

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uji sebagai upaya untuk mengidentifikasi korelasi antara variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (X1), Upah Minimum Provinsi (UMP) (X2), dan belanja daerah (X3) terhadap jumlah penduduk miskin (Y) di Provinsi Jawa Timur. Dapat ditarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2008-2022. Dengan adanya peningkatan PMDN, penduduk miskin di wilayah tersebut diperkirakan akan berkurang. Pemanfaatan PMDN yang efektif di sektor padat karya dan modal menciptakan peluang kerja yang melimpah dan menarik banyak pengangguran. Masuknya lapangan kerja selanjutnya akan meminimalisir tingkat pengangguran dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Sehingga kapasitas daerah dalam mengurangi angka kemiskinan juga akan terkena dampak positif. Dengan demikian, disimpulkan bahwa PMDN ikut andil dalam menurunkan masalah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
2. Upah minimum tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2008-2022. Menaikkan upah minimum tidak menjamin penurunan prevalensi kemiskinan di wilayah tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa wilayah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Jawa Timur diikuti dengan upah minimum paling rendah di wilayah tersebut. Hal ini membuat masyarakat wilayah tersebut tidak dapat

memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga berpotensi terhadap peningkatan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Disimpulkan bahwa upah minimum tidak berpengaruh terhadap prevalensi kemiskinan.

3. Belanja daerah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2008-2022. Peningkatan belanja daerah di Provinsi Jawa Timur diharapkan membantu mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan fasilitas pendidikan. Investasi ini sangat penting karena tidak hanya menarik calon investor tetapi juga meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui peningkatan sistem kesehatan dan pendidikan. Produktivitas yang lebih tinggi di kalangan penduduk berkontribusi terhadap kesejahteraan secara keseluruhan dan mengurangi prevalensi kemiskinan. Dengan demikian, disimpulkan bahwa masalah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur berkorelasi terbalik dengan belanja daerah.

## **1.2 Saran**

Berikut hal-hal yang perlu dipertimbangkan sehubungan dengan hasil yang dibahas sebelumnya.

1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat lebih maksimal dalam mengelola modal investasi yang masuk dengan cara melakukan pendistribusian pada sektor-sektor ekonomi di setiap kabupaten/kota. Dengan adanya modal yang merata, maka lapangan kerja yang terbuka juga akan merata sehingga hal ini akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat yang merata pula serta jumlah penduduk miskin akan berkurang. Selain itu kemandirian akan

potensi ekonomi lokal juga harus didorong mengingat situasi ekonomi secara global yang tidak dapat diprediksi.

2. Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat mengalokasikan dan merealisasikan belanja daerah secara maksimal dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas pada sektor pendidikan serta kesehatan sebagai upaya dalam meningkatkan perekonomian dan menurunkan kemiskinan. Perlu adanya keberpihakan kepada masyarakat dalam mengurangi adanya rigiditas pendistribusian anggaran sehingga dapat digunakan secara efisien untuk memberdayakan warga.
3. Hasil temuan ini diharapkan menjadi saran untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penetapan intervensi yang akan diambil dalam proses penanggulangan masalah kemiskinan.
4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti bisa menambahkan variabel lainnya ataupun menambahkan tahun yang akan digunakan agar memperoleh hasil penelitian yang lebih sempurna.